

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin & Zainal Asikin, 2021, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan 10, Depok : Rajawali Pers.
- Amirudin dan Zinal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampne, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Atsasmita, Romli, 2001, Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi, Mandar Maju, Bandung.
- Atsasmita, Romli, 2004, Sekitar Masalah Korupsi (Aspek Nasional dan Aspek Internasional), Mandar Maju, Bandung.
- Chairudin, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung.
- Cst Kansil, 2009, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, Hukum Pidana 1, Sinar Greafika, Jakarta.
- Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentari), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta.
- KPK, 2006, Buku Saku : Memahami untuk membasmi.
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, „Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama,Bandung.
- Logman, Loebby 2000, Pidana dan Pemidanaan, Datacom, Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafuka.

- Meljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (edisi revisi, Kencana, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Nadapdap, Binoto, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Permata Aksara.
- Ngani, Nico, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Prasetya, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Priyatno, Dwija, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung.
- R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Seno Adji, Indriyanto, 2009, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Diaudit Media, Jakarta.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 19, Depok : Rajawali Pers.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, P.T.Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, Bambang, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **Jurnal**

- Mawikere, A. L. (2016). Tanggungjawab Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Vol.5 No.1.
- Mufti, A., Selajar, S. Y., & Mutalib, M. T. (2019). Pertanggungjawaban Pimpinan BUMN/BUMD Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1, 65-83.
- Rahmadinah, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Santoso, Topo, Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia, *Jurnal dinamika Hukum* Vol. 13 No. 3
- Simangunsong, M., Manullang, H., & Purba, T. R. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Terbatas Pembangunan Rumah Sakit (Studi Putusan No. 15/PID. SUS-TPK/2018/PN. MDN). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol.2 No.1, 103-132.
- Soentoro, G. C., Indriani, M., Baihaqi, A., & Irawan, S. G. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Komisaris dan Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 44/Pidsus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst). *Jurnal IKAMAKUM*, Vol.1 No.1.
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol.1 No.2, 169-162.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan KPK No. 02 Tahun 2014 dan No. 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **Website**

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/01/pejabat-pemerintah-dan-bumn-paling-rajin-lapor-gratifikasi>

Memahami Kepastian dalam Hukum (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com>  
diakses pada tanggal 17-12-2021 pukul : 02:52 WIB)